

# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KABUPATEN LUWU**





**IKK LRA KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2024**  
**SESUAI PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2020**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	<p>Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)</p> <p>33,26</p> <p>----- X 100%</p> <p>305,29</p> <p>Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	10,90	1	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)		305,29
				2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)		32.736
2	Rasio Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	<p>Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1,28</p> <p>----- X 100%</p> <p>9,29</p> <p>Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	13,78	3	Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)		9,29
				4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)		32.736
				5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota		-
				6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota		-
				7	Data Prasarana dan Sarana Pengamanan Pantai dan Sungai Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Perkuatan Tebing	3.696

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/ Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	<p>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) ditahun eksisting</p> $\frac{6.070}{8.904} \times 100\%$ <p>Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota</p>	68,17	1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dalam kondisi baik	<p>Panjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik (m)</p> $\frac{61.308}{118.013} \times 100\%$ <p>Panjang jaringan irigasi primer (m)</p>	51,95
				2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi baik	<p>Panjang saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)</p> $\frac{24.788}{42.151} \times 100\%$ <p>Panjang jaringan irigasi sekunder (m)</p>	58,81
				3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi baik	<p>Panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik (m)</p> $\frac{0}{0} \times 100\%$ <p>Panjang jaringan irigasi Tersier (m)</p>	0,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	<p>Jumlah Komulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kabupaten/Kota</p> $\frac{55,749}{79,501} \times 100\%$ <p>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut</p>	70,12	1	Pemenuhan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	-	Dokumen RISPAM TA. 2020 - 2034
				2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	-	-
				3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggaran SPAM	-	1 PDAM, 85 KPSPAMS
				4	Jumlah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaran SPAM		86 Izin



NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
				5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	-	80
5	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<p>Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> $\frac{60402}{79501} \times 100\%$ <p>Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Luwu</p>	75,98	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		59.962
				2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T		440
				3	Jumlah rumah dengan akses pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD - S dan SPALD - T		60.402
				4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		-
				5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		-
				6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		440
				7	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar	<p>Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik</p> $\frac{60402}{79501} \times 100\%$ <p>Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPAD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun &lt; 25 jiwa/ha</p>	75,98

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
				8	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah IPLT  3452 ----- X 100% 67521	5,11
				9	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman	Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD  440 ----- X 100% 41319	1,06
				10	Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan setempat	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD  3452 ----- X 100% 67521	5,11
				11	Kinerja Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah Rumah yang termasuk dalam wilayah Pengembangan SPALD-S Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia  0 ----- X 100% 0	
				12	Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja	Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kabupaten/kota Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia  0 ----- X 100% 0	



NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
				13	Kinerja Penyediaan Sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten/kota Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD $\frac{440}{440} \times 100\%$	100
				14	Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD - T pada kabupaten/kota Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot $\frac{0}{0} \times 100\%$ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	
6	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya $\frac{8.846}{8.846} \times 100\%$ Jumlah IMB yang berlaku	100	1	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal tunggal dan Rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi berlaku $\frac{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}}{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$	
				2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam		Perda Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2013
				3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		
				4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		
				5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
				6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah		
				7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota		
				8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dalam K0ndisi Mantap 559,235 ----- X 100% 1823,4 Jumlah Total Panjang Jalan Kabupaten/Kota	30,67	1	Panjang Jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.823,40 Km
				2	Panjang jalan yang dibangun	-	40.626,00 M
				3	Panjang jembatan yang dibangun	-	71,00 M
				4	(Struktur/Fungsi)	-	13.152,67 M
				5	diganti/dilebarkan	-	-
				6	direhabilitasi	-	37.964,00 M
				7	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	-	-
				8	Panjang Jalan yang dipelihara	-	5.905,00 M
				9	Panjang Jembatan yang dipelihara	-	-
7	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- X 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan tenaga teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Operator/Teknisi/Analisis di wilayah kabupaten/kota	-	
				2	Jumlah Tenaga Kerja Operator/Teknis/Analisis yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	-	



NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
				3	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota	-	174 Orang
				4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	-	
				5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	-	
				6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	
				7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari <u>Pendanaan lainnya</u>	-	
				8	Tersedianya data dan informasi Paket Pekerjaan sesuai Kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	
				9	Tersedianya data dan profil OPD SUB-Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	-	
				10	Tersedianya data dan informasi Pelatifa Tenaga Operator dan Teknisi/Analisis Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang idregistrasi oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah Lainnya	-	



NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
				11	Tersedianya data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di Wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Sertifikasi Pelatihan Operator dan Teknis/Analisis	-	
				12	Tersedianya data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi yang Tersertifikasi Operator/Teknisi/Analisis di Wilayah Kabupaten/Kota	-	
				13	Tersedianya data dan Informasi Badan Usaha yang mendapatkan Pembinaan di Wilayah Kabupaten/Kota		
				14	Tersedianya data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK, Badan Usaha dan TDUP yang disetujui		
				15	Tersedianya data dan Informasi hasil Pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi yang menjadi Kewenangan Pengawasannya		
				16	Tersedianya data dan Informasi Kecelakaan Konstruksi pada Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	
				17	Tersedianya data dan Informasi Hasil Pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar Jasa Konstruksi yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	-	
				18	Jumlah Badan Usaha yang memiliki IUJKN di Wilayah Kabupaten/Kota	-	
				19	Jumlah Usaha Perseorangan yang memiliki TDUP di Wilayah Kabupaten/Kota	-	
				20	Jumlah Badan Usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di Wilayah Kabupaten/Kota	-	



NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
				21	Jumlah Badan Usaha yangf mendapatkan pembinaan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	
				22	Jumlah Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang disetujui	-	
				23	Jumlah Pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	-	
				24	Jumlah kecelakan kosntruksi pada Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	-	
				25	Jumlah Pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi Pasar Jasa Konstruksi yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	-	
8	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakan Konstruksi	<p>Jumlah Proyek yang menjadi Kewenangan pengawasannya tanpa kecelakan konstruksi</p> <p>0</p> <p>----- X 100%</p> <p>132</p> <p>Jumlah Total Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>	0			-	

Belopa, 05 Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



**Ir. IKHSAN ASAAD, ST., MT., CCMS**

PANGKAT : PEMBINA TK. I

NIP. 19770912 200604 1 009